



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DALAM
MENURUNKAN ANGKA KELUARGA BERESIKO STUNTING
DI DESA OLEAN KECAMATAN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

Elvira Githa Sena Putri

190910201019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2026**

SKRIPSI INI TIDAK UNTUK DIKUTIP



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DALAM
MENURUNKAN ANGKA KELUARGA BERESIKO STUNTING
DI DESA OLEAN KECAMATAN SITUBONDO**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Ilmu Administrasi Negara*

SKRIPSI

Oleh

Elvira Githa Sena Putri

190910201019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2026**

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. keluarga tercinta. Bapak Elenk dan Ibu Titik, selalu mendoakan serta dengan sabar mendukung tanpa batas dalam membesarkan dan mendidik saya;
2. adik tersayang. Aurellia Kirana Sena Putri, yang senantiasa memberikan semangat kepada saya;
3. guru-guru yang telah memberi dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. almamater tercinta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Negara, Universitas Jember.

MOTTO

“I think everyone has their strength and they shine in different ways.

Everyone is special”¹



¹ <https://x.com/mynameitsss/status/1597783618050752512?s=20> (diakses 24 Juni 2026).

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvira Githa Sena Putri

NIM : 190910201019

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Implementasi Program Bangga Kencana dalam Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2026

Saya menyatakan,

 Elvira Githa Sena Putri
190910201019

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DALAM
MENURUNKAN ANGKA KELUARGA BERESIKO STUNTING
DI DESA OLEAN KECAMATAN SITUBONDO**

Oleh:

Elvira Githa Sena Putri

190910201019

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Hermanto Rohman, S.Sos., M.AP

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Suji, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting Di Desa Olean, Kecamatan Situbondo* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos., M.AP

NIP : 197903032005011001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Suji, S.Sos., M.Si

NIP : 197006152008121002

Tanda Tangan



Penguji

1. Penguji Utama

Nama : M. Hadi Makmur S.Sos.M.AP

NIP : 197410072000121001

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Setyowati Karyaningtyas S.Sos., M.Si

NIP : 198807172024212048



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Di Desa Olean, Kecamatan Situbondo merupakan daerah kecamatan dan desa yang memiliki angka keluarga resiko stunting terendah yakni di tingkat kecamatan, Kecamatan Situbondo berhasil menurunkan angka keluarga resiko stunting dari 1.328 keluarga menjadi 916 keluarga sedangkan di tingkat desa, Desa Olean berhasil menurunkan keluarga resiko stunting dari 345 keluarga menjadi 145 keluarga di Tahun 2024. Peneliti memilih Desa Olean, Kecamatan Situbondo sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Olean di Kecamatan Situbondo ini merupakan angka keluarga beresiko stunting yang termasuk terendah diantara kecamatan dan desa lainnya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dalam Sugiono, 2017. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa selain variabel sumber daya yang kurang dalam kepegawaian dan fasilitas alat, teori variabel seperti komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah menunjukkan hasil yang positif.

Kata kunci: Implementasi, Program Bangga Kencana, Keluarga Beresiko Stunting

ABSTRACT

This study aims to describe how the implementation of Bangga Kencana Program has reduced the number of families at risk of stunting in Olean Village, Situbondo District. Olean Village, Situbondo Subdistrict, is a subdistrict and village with the lowest number of families at risk of stunting, specifically at the subdistrict level, Situbondo Subdistrict succeeded in reducing the number of families at risk of stunting from 1,328 families to 916 families, while at the village level, Olean Village succeeded in reducing the number of families at risk of stunting from 345 families to 145 families by 2024. The researcher selected Olean Village, Situbondo Subdistrict, as the research location because Olean Village in Situbondo Subdistrict has one of the lowest rates of families at risk of stunting among other subdistricts and villages. This study employs a descriptive qualitative method. Informants were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. This study employed triangulation to test data validity. Data analysis utilized the Miles & Huberman interactive model as described in Sugiono, 2017. The findings indicate that although variables related to human resources and equipment facilities were identified as inadequate, theoretical variables such as communication, disposition, and bureaucratic structure yielded positive results.

Keywords: *Implementation, the Bangga Kencana Program, Families at Risk of Stunting*

RINGKASAN

Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo; Elvira Githa Sena Putri; 190910201019; 2026; 63 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Program Bangga Kencana ini bertujuan meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, menjamin pemenuhan asupan gizi, serta memperbaiki pola asuh melalui intervensi yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya kasus keluarga resiko stunting, pemerintah menurunkan Undang Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menegaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan tangguh serta diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kebijakan ini menuntut peran aktif pemerintah daerah hingga desa untuk memastikan intervensi tepat sasaran dengan fokus utama pada kelompok sasaran terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui serta balita. Kecamatan Situbondo merupakan salah satu kecamatan yang aktif menjalankan program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting dan kecamatan ini berhasil menurunkan angka keluarga beresiko stunting dari 1.328 keluarga menjadi 916 keluarga serta salah satu desa yang berada di Kecamatan Situbondo juga berhasil menurunkan keluarga resiko stunting dari 345 menjadi 145, desa ini merupakan Desa Olean.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George Edward III untuk mendeskripsikan implementasi Program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman dalam Sugiono, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel model implementasi George Edward III yaitu pada komunikasi dari transmisi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi telah dilaksanakan dengan baik. Pada sumber daya program Bangga Kencana terkait ketersediaan sumber daya manusia kurang memadai, anggaran masih terbatas namun semua pelaksana telah memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia, ketersediaan fasilitas di tingkat kecamatan telah cukup memadai namun di tingkat desa ketersediaan alat pengukuran dan penimbangan baduta harus meminjam ke posyandu. Pada disposisi seluruh jajaran pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dan menunjukkan sikap yang positif, serta kegigihan TPK dalam membangun kepercayaan masyarakat yang sulit didekatin cukup bagus sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam program. Pada struktur birokrasi telah dinilai cukup jelas dan rinci, susunan organisasi dan tupoksinya ini bersumber pada BKKBN dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkat, rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting Di Desa Olean, Kecamatan Situbondo”*. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. ibu Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP. CIQaR selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi sekaligus ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. bapak Dr. Sutomo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, serta menjadi pendukung utama dalam perjalanan akademik saya di Universitas Jember;
4. bapak Hermanto Rohman, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Suji, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. bapak M. Hadi Makmur S.Sos.M.AP selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Dr. Setyowati Karyaningtyas S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan kritik dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini;
6. bapak Elenk dan Ibu Titik, selaku kedua orang tua saya yang telah berkorban, memberikan nasihat, dan cinta tanpa batas;

7. pihak-pihak dari bagian bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Situbondo, Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Situbondo dan Tim Pendamping Keluarga Desa Olean yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulis memperoleh data yang diperlukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. sepupu saya Khifa dan keluarga lainnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam perjalanan ini;
9. agne, Feni, Ayu, Widy, Ana dan teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan;
10. seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yagn telah diberikan selama ini.

Jember, 24 Juni 2026

Penulis

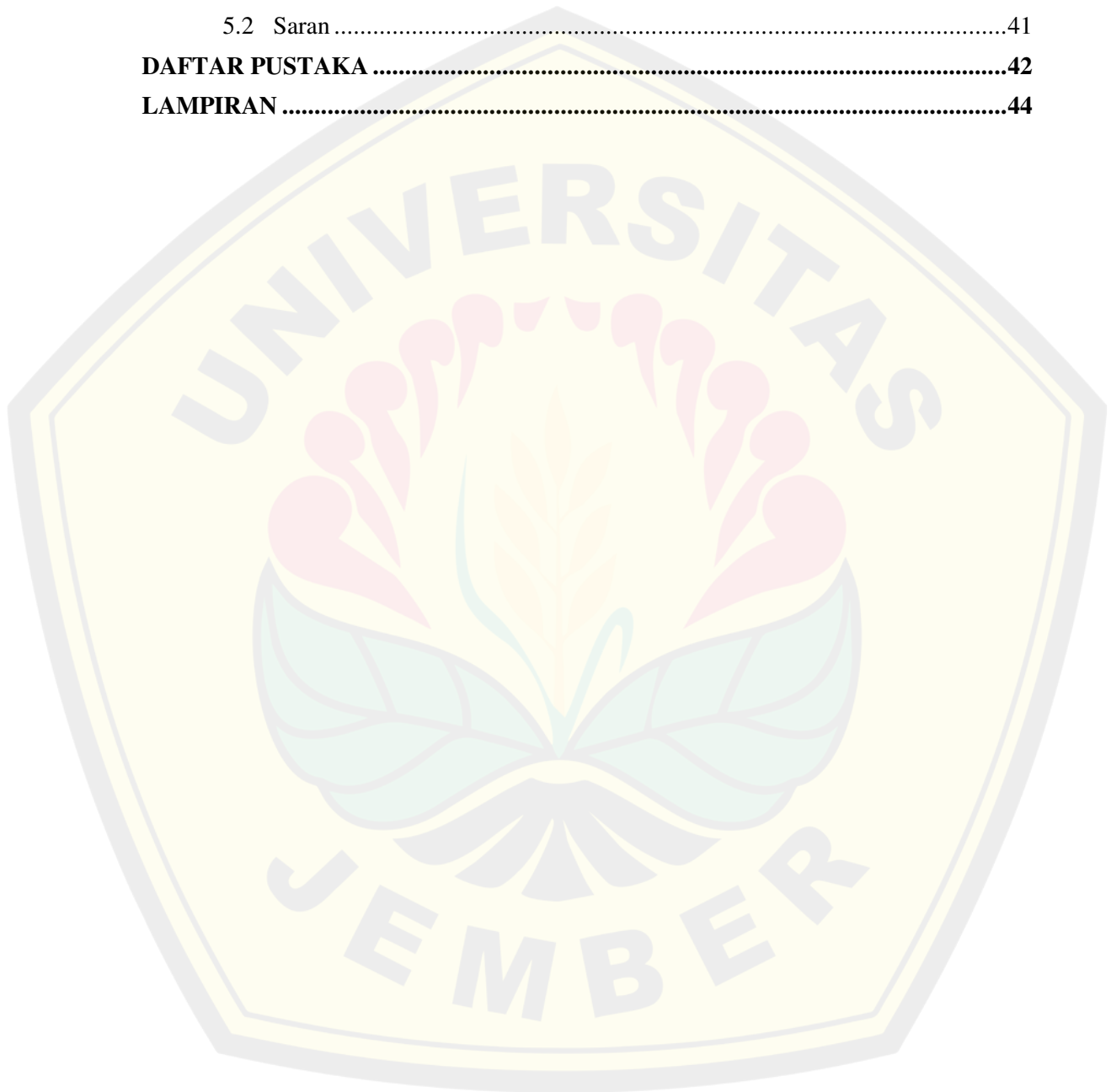
Elvira Githa Sena Putri

NIM 190910201019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN.....	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kebijakan Publik	6
2.2 Implementasi Kebijakan	7
2.3 Keluarga Resiko Stunting	13
2.4 Program Bangga Kencana.....	13
2.5 Kerangka Berpikir	15
2.6 Penelitian Terdahulu	16
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Pendekatan Jenis Penelitian	17
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	18
3.5 Keabsahan Data	19
3.6 Analisis Data	20
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	22
4.2	Deskripsi Program Bangga Kencana	23
4.3	Penyajian Data Hasil Penelitian	24
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	35
BAB 5.	PENUTUP.....	40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN		44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keluarga Resiko Stunting di Kabupaten Situbondo 2023- 2024.....	1
Tabel 1.2 Data Keluarga Resiko Stunting Per Desa 2023-2024	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar Informasi Kunci	18
Tabel 4.1 Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting Berdasarkan Wilayah	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan	7
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	14
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	19
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Olean	21



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan mengenai implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Keluarga resiko stunting merupakan keluarga Sasaran yang memiliki resiko tinggi untuk melahirkan anak stunting, keluarga resiko stunting itu sendiri terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui serta balita. Permasalahan stunting masih menjadi isu global, tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di berbagai negara dan masalah ini menjadi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dasar kebijakan terkait dengan kasus ini pemerintah menurunkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menegaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan tangguh serta diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah hingga desa dituntut untuk berperan aktif dalam melaksanakan intervensi yang tepat sasaran melalui proses verval data (verifikasi dan validasi data). Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang aktif menjalankan program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting. Berdasarkan pada data rekapitulasi keluarga resiko stunting Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmen nyata dalam menekan angka keluarga resiko stunting, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Keluarga Resiko Stunting di Kabupaten Situbondo 2023- 2024

No.	Kecamatan	KRS 2023	KRS 2024
1	Sumbermalang	3.629	1.668
2	Jatibanteng	2.936	2.338
3	Banyuglugur	1.840	1.548
4	Besuki	4.015	2.978
5	Suboh	2.544	1.938
6	Mlandingan	2.563	2.378
7	Bungatan	1.661	1.161
8	Kendit	2.102	1.306
9	Panarukan	2.256	1.631
10	Situbondo	1.328	916
11	Mangaran	2.145	1.569
12	Panji	2.577	1.921
13	Kapongan	3.162	2.667
14	Arjasa	4.066	2.989
15	Jangkar	3.944	2.641
16	Asembagus	2.077	1.434
17	Banyuputih	3.212	2.183
Jumlah		46.057	33.266

Sumber data: Rekapitulasi Keluarga Berisiko, 2025 (diolah peneliti).

Berdasarkan pada tabel 1.1, terlihat bahwa Kecamatan Situbondo telah menunjukkan penurunan angka keluarga resiko stunting mencapai 916 pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 1.328 keluarga beresiko stunting. Dengan ini, percepatan penurunan pada keluarga resiko stunting mengalami penurunan secara signifikan dibanding dengan kecamatan lainnya, serta kecamatan ini memiliki 6 wilayah desa, yakni Desa Kalibagor, Kotakan, Dawuhan, Patokan, Talkandang, dan Olean. Salah satu desa yang berhasil menurunkan keluarga resiko stunting terjadi di Desa Olean, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Keluarga Resiko Stunting Per Desa 2023-2024

No.	Desa	KRS 2023	KRS 2024
1	Kalibagor	63	54
2	Kotakan	208	164
3	Dawuhan	322	211
4	Patokan	278	226
5	Talkandang	112	116
6	Olean	345	145
Jumlah		1.328	916

Sumber data : rekapitulasi keluarga resiko stunting, 2025 (diolah peneliti)

Berdasarkan pada tabel 1.2, terlihat bahwa pada tahun 2023 Desa Olean merupakan kasus keluarga resiko stunting tertinggi yang mencapai 345, namun pada tahun 2024 kasusnya turun secara signifikan mencapai 145 keluarga resiko stunting. Keberhasilan ini tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan seperti proses verifikasi dan validasi data langsung ke keluarga sasaran untuk memastikan keakuratan tindakan.

Penanganan dalam penurunan stunting dapat dilakukan secara intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang bertujuan menangani penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan yang bertujuan menangani penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan keluarga resiko stunting merupakan gabungan dari intervensi sensitif dan intervensi spesifik sebagai pencegahan dini, aktivitas sosialisasi hingga kunjungan langsung ke rumah, ini merupakan wujud nyata yang dilakukan untuk mencegah kelahiran anak stunting melalui proses verifikasi dan validasi data. Dengan proses ini, pemerintah desa tidak hanya melakukan intervensi sensitif saja namun juga melakukan intervensi spesifik bagi kelompok sasaran agar kelompok sasaran ini tepat sasaran mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang tepat.

Secara empiris, dalam penelitian sebelumnya terkait implementasi program Bangga Kencana menunjukkan pola yang konsistensi seperti implementasinya telah berjalan lancar namun masih terdapat kendala pada satu atau lebih dimensi. Beberapa penelitian sebelumnya dengan permasalahan terkait program Bangga Kencana mengalami hal serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Devina dan Ananda (2025) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa implementasi Program Bangga Kencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk telah berjalan cukup baik, namun masih adanya hambatan pada aspek keterbatasan jumlah sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian lainnya bahwa peran penyuluhan dan edukasi Program Bangga Kencana di daerah pedesaan pada Kabupaten Bogor dalam pencegahan stunting masih menghadapi

kendala berupa keterbatasan tenaga penyuluh, kendala sosial-budaya, serta akses informasi yang belum merata, sehingga keberlanjutan dampak program belum sepenuhnya tercapai (Nuranti, Rahmawati, dan Lyndon (2025). Rachmawati, Hartono, dan Radjikan (2024) dalam hasil penelitiannya menunjukkan implementasi *collaborative governance* di Kabupaten Sidoarjo dalam Program Bangga Kencana untuk menekan angka stunting, masih menemukan hambatan seperti peraturan yang kurang tegas, bantuan yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya pembaharuan data di lapangan, serta minimnya anggaran operasional di tingkat OPD.

Pada lokasi seperti di Desa Olean, Kecamatan Situbondo hasil implementasi dari program Bangga Kencana justru menunjukkan capaian yang signifikan, yakni penurunan angka keluarga resiko stunting dari 345 keluarga di tahun 2023 menjadi 145 keluarga pada tahun 2024. Hal tersebut menjadikan desa Olean sebagai salah satu desa dengan angka keluarga resiko stunting terendah di Kecamatan Situbondo yang berhasil menekan angka dari sejumlah 1.328 menjadi 916 keluarga. Adanya kesenjangan antara hasil penelitian terdahulu menunjukkan implementasi program yang belum optimal dengan capaian nyata seperti di Desa Olean, inilah yang menjadi gap empiris yang mendasari penelitian ini menarik untuk diteliti dengan menggunakan teori George Edward III (1980), pada teori yang dipakai terdapat empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka yang diharapkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam topik pembahasan.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan dan gambaran informasi mengenai implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo serta masyarakat juga dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dikutip dalam Winarno, 2011) kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu atau persoalan. Menurut Sawir (2021) kebijakan publik adalah sesuatu yang dinamis dan kompleks bukannya sesuatu yang kaku dan didominasi oleh para pemerintah, namun kebijakan publik kembali ke makna dasar demokratiknya yakni kebijakan yang dari, oleh dan untuk rakyat. Berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Tahapan dari proses pembuatan kebijakan publik ini dibuat dengan proses yang kompleks karena dalam prosesnya melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Menurut Winarno (2011) proses tahap kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda. Pada tahap ini para pejabat akan menyeleksi permasalahan yang akan menjadi prioritas dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Penentuan permasalahan yang akan diangkat dipilih berdasarkan tingkat masalah yang memiliki dampak besar atau yang mendapatkan perhatian publik.
- b. Formulasi Kebijakan. Pada tahap ini, masalah yang masuk ke agenda akan dibahas oleh para pembuat kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah.

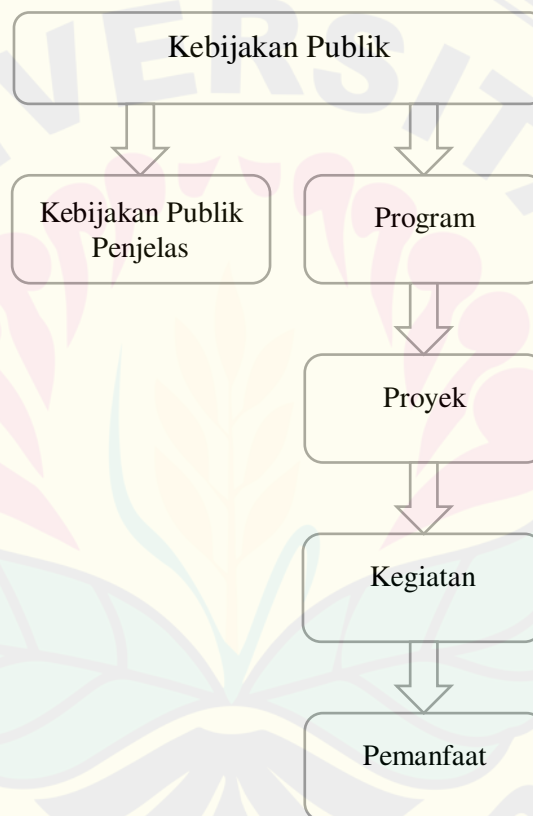
- c. Adopsi Kebijakan. Pada tahap ini, alternatif solusi yang terpilih akan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Kebijakan yang disetujui akan diresmikan dan diumumkan pada publik, ini mencakup penetapan tanggal berlaku dan rincian implementasi.
- d. Implementasi Kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang disetujui mulai diimplementasikan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial, dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi mendapat dukungan dari para pelaksana namun beberapa mungkin akan ada yang menentang oleh para pelaksana.
- e. Evaluasi Kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai apakah kebijakan tersebut telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah mencapai apa yang diinginkan.

Tahapan kebijakan publik ini merupakan tindakan penting yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai mengevaluasi hasilnya dengan tujuan mendukung kesejahteraan dan perkembangan masyarakat serta negara.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1980, dikutip dalam Tresiana & Duadji, 2019) memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Patton &

Sawicki (dikutip dalam Tresiana & Duadji, 2019) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Berdasarkan pada definisi diatas Implementasi kebijakan merupakan aktivitas pemerintah dalam merealisasikan, mengorganisir, mengiterpretasikan suatu program dengan tujuan yang telah disepakati. Secara umum, model Implementasi kebijakan publik yang digunakan Indonesia menganut model kontinentalis, model ini terdiri dari:



Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan
(Sumber: Nugroho, 2024)

Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memerhatikan beberapa dimensi, yakni pertama, dimensi proses yang mencakup pada proses mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan yang melibatkan pemahaman tentang cara masyarakat membuat pilihan kolektif untuk kepentingan publik. Kedua, dimensi program mencakup pada tindakan nyata yang diambil

pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan serta melalui proses legislatif. Terakhir, dimensi politik yang mencakup pada keputusan-keputusan pemerintah, termasuk bagaimana dan kapan kebijakan itu diambil, memiliki konsekuensi politik yang mempengaruhi reputasi dan kemampuan mereka dalam mengelola. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan itu relatif dan bergantung pada berbagai macam kepentingan yang terlibat serta pemantauan secara terus menerus untuk memastikan implementasi program berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

2.2.1 Implementasi dalam Perspektif Bottom Up

Perspektif *bottom-up* muncul pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an sebagai respon kritis terhadap pendekatan *top-down*. Pendukung pendekatan *bottom-up* adalah Lipsky (1971), Ingram (1977) dan Elmore (1980) menekankan bahwa Implementasi merupakan strategi penyelesaian masalah sehari-hari yang dilakukan oleh birokrat di tingkat bawah sering disebut dengan “*street-level bureaucrats*”. Model *bottom-up* merupakan model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Ahli kebijakan yang memfokuskan model Implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom-up* adalah Smith. Model Smith ini memandang bahwa proses Implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan politik dan sosial, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran

2.2.2 Implementasi dalam Perspektif Top Down

Menurut Nugroho (2011, dikutip dalam Herbudin 2016) ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan dan ini adalah beberapa model-model implementasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, sebagai berikut:

a. Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Model ini memiliki beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, setiap kebijakan harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka dapat menimbulkan kesalahpahaman serta konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya, Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya metode, maupun sumber daya materi.
3. Hubungan Antarorganisasi, dalam program Implementasi kebijakan sebagai realitas dari program kebijakan, memerlukan hubungan yang baik antarinstansi yang berkaitan dengan cara dukungan komunikasi dan koordinasi karena ini menjadi salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar semua berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, untuk mencapai keberhasilan maksimal suatu Implementasi kebijakan harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana mencakup norma, struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan itu akan mempengaruhi Implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi Implementor, Implementasi kebijakan disposisi atau sikap implementor dibedakan menjadi tiga yakni pertama, respon implementor terhadap kebijakan terkait kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Kedua, kondisi yakni pemahaman mengenai

kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, intens disposisi yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi Lingkungan, Sosial, Politik dan Ekonomi, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, sifat opini pemerintah yang ada di lingkungan, apakah elite politik mendukung Implementasi kebijakan, dan sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi Implementasi kebijakan.

b. George Edward III (1980)

Model implementasi yang ditetapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communication*) berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan pada organisasi publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Kebijakan akan berjalan efektif ketika para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan diteruskan kepada personil yang tepat, dalam proses komunikasi ada tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi.
2. Sumber daya (*resource*) berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang memadai serta penerima manfaat yang tepat karena ini berkaitan dengan kecapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
3. Disposisi (*disposition*) berkaitan dengan ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik

tersebut. Sikap, komitmen, dan kejujuran para pelaksana kebijakan menentukan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kecenderungan sikap perilaku para pelaksana dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structures*) berkaitan dengan kesesuaian struktur birokrasi seperti prosedur rutin dan mekanisme pembagian tugas antar pelaksana, yang memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, jika struktur birokrasi tidak jelas maka implementasi program tidak akan berjalan dengan baik.

c. Marilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan Implementasi kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, antara lain:

1. Variabel Isi Kebijakan, mencakup sejauh mana kepentingan kelompok Sasaran termuat dalam isi kebijakan pemerintah, jenis manfaat yang diterima oleh Sasaran, letak sebuah program sudah tepat, Perubahan yang diinginkan oleh kebijakan, kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan terperinci, sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Variabel Lingkungan Kebijakan, mencakup pertama, besarnya kekuatan, strategi, dan kepentingan yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok Sasaran. Ketiga, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.

2.3 Keluarga Resiko Stunting

Keluarga resiko stunting merupakan keluarga sasaran yang memiliki satu atau lebih faktor resiko terutama dari keluarga kurang mampu, pola asuh yang tidak tepat, air minum yang tidak layak dan sanitasi yang buruk, kriteria dari keluarga ini terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui serta anak 0-59 bulan, faktor resiko utama yakni mencakup pada kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak). Keluarga beresiko stunting tidak semata-mata ditetapkan sebagai keluarga ini terkena stunting namun melalui survei BKKBN yang dilakukan tiap tahun disebut sebagai verifikasi dan validasi keluarga resiko stunting.

Dengan kasus tersebut, pentingnya mendeteksi sejak dini dan proses ini diperlukan untuk intervensi yang tepat sasaran supaya mengurangi dan mengatasi permasalahan stunting, serta guna mencegah dampak jangka panjang yang merugikan pada anak. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menekankan bahwa pentingnya pendampingan keluarga berisiko stunting, dengan adanya pendampingan ini keluarga sasaran akan mendapatkan bantuan berupa suplementasi gizi, sanitasi yang baik, konseling pola asuh serta jaminan perlindungan sosial.

2.4 Program Bangga Kencana

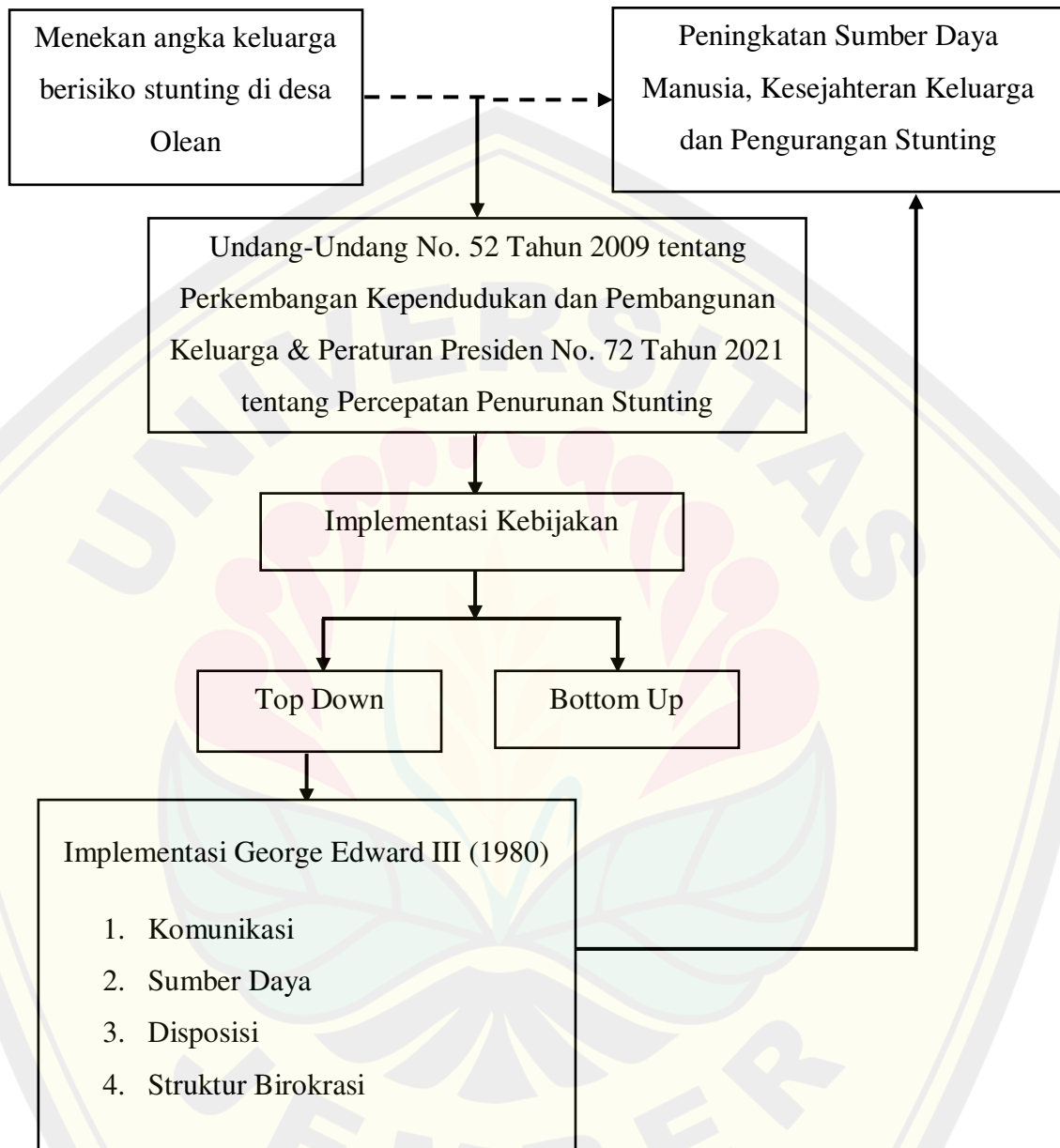
Bangga Kencana merupakan program yang dibuat oleh BKKBN bertujuan mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup di lingkungan yang sehat. Program ini *re-branding* atau perubahan nama dari program sebelumnya, yakni Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dikenal dengan KKBPK kemudian berubah menjadi Bangga Kencana yang diresmikan pada tahun 2019 sejak perubahan namanya. Intervensi yang dilakukan melalui program Bangga Kencana mencakup berbagai strategi, seperti penyuluhan asupan gizi melalui makanan bergizi, pola makan yang sehat, perbaikan sanitasi, dan akses ke fasilitas kesehatan serta program pendidikan untuk orang tua tentang gizi selama kehamilan, dan masa anak-anak. Tujuan program Bangga Kencana dalam mengatasi kasus keluarga beresiko stunting untuk meningkatkan kesadaran,

pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting pada anak. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat semakin aktif dan peduli dalam melakukan tindakan mencegah stunting sehingga angka stunting dapat berkurang, serta mendukung generasi yang sehat, produktif dan cerdas. Ada beberapa kegiatan dari program ini, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama untuk calon orang tua dan keluarga, mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga balita.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keluarga yang rentan terhadap stunting dengan cara edukasi, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Menginformasikan mengenai pola asuh dan gizi yang baik, terutama terkait pentingnya asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, di mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
4. Memberi pengetahuan terkait risiko dan dampak dari stunting pada anak sehingga masyarakat memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
5. Mempromosikan penggunaan layanan kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan dan posyandu untuk memastikan pemantauan kesehatan anak dan ibu berjalan optimal.
6. Menggalakkan program keluarga berencana supaya jarak kelahiran antara anak bisa direncanakan dengan baik, membantu kesiapan fisik dan orang tua dalam perkembangan anak.
7. Meningkatkan kesadaran terkait pola hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga untuk mengurangi risiko stunting.

Dengan memahami penyebabnya serta dampak stunting, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah dan melaksanakan strategi pencegahan yang efektif dengan harapan dapat menekan prevalensi stunting meningkat, meningkatkan kesehatan anak serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak untuk mencapai potensi terbaik di hidup mereka

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
(Sumber: diolah peneliti)

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Feby Jenifer S. Sokoy (2023)	Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Proses Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Jayapura	Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Jayapura oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan teori yang diambil, namun masih ada masalah di indikator komunikasi yakni kejelasan informasi karena belum sampai kepada pihak distrik maupun puskesmas tapi dinas sudah melaksanakan sosialisasi langsung ke kampung. Dan indikator sumber daya belum memadai karena SDM staf lapangan masih kurang.	Teori yang digunakan, kualitatif deskriptif, membahas program Bangga Kencana	Lokasi penelitian
Muharram, Cholifah & Utami (2024)	Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan secara efektif, namun terdapat tantangan signifikan di tingkat desa. SDM dan non-manusia dianggap memadai, namun distribusinya belum merata. Disposisi implementor memiliki komitmen tinggi terhadap program, namun transparansi dalam pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan. Struktur birokrasi telah mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan walaupun beberapa prosedur terlalu rumit.	Membahas program Bangga Kencana, Kualitatif deskriptif, Teori yang digunakan	Lokasi penelitian
Utomo, Nurcahyanto & Marom (2023)	Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana Keluarga Berencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan finansial yang menghambat keberlangsungan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang	Membahas program Bangga Kencana, Kualitatif deskriptif, Teori yang digunakan	Lokasi penelitian, Fokus pada angka pernikahan dini

Sumber: tabel diolah peneliti

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang pandangan, pengalaman yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme* atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi) dan hasil penelitian ini untuk memahami makna, keunikan, dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek penelitian.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti bisa memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Selain itu, peneliti juga akan penelitian di balai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Situbondo serta Desa Olean yang berhasil menurunkan angka keluarga resiko stunting yakni dari 345 keluarga pada tahun 2023 turun menjadi 145 keluarga pada tahun 2024. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2025.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002, dikutip dalam Gunawan, 2013). Observasi dibagi menjadi tiga, yakni observasi partisipasi, observasi

terus terang atau tersamar, dan observasi tidak berstruktur (Afifuddin & Saebani, 2012). Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, namun dalam observasi partisipasi terdapat 4 sikap peneliti yakni partisipan aktif, partisipasi pasif, partisipasi moderat, serta partisipasi naturalistik atau lengkap dan dalam penelitian ini menggunakan partisipasi pasif yang dimana peneliti hanya datang ke lokasi, memerhatikan, mewawancara saja.

2. Wawancara adalah sebuah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005 dikutip dalam Gunawan, 2013). Wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur, pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi mengenai pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada informan dan bisa juga ketika sewaktu waktu peneliti terpikirkan sebuah pertanyaan maka peneliti bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada informan.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Bahan dokumentasi ini biasanya berupa tulisan, gambar, catatan yang berkaitan dengan program Bangga Kencana dan lainnya.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2015) Informan penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi baik mengenai dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Dalam penentuan informan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena melalui teknik ini penentuan sumber informasi didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang akan menjadi informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut serta orang yang terlibat dalam pelaksanaan program Bangsa Kencana. Oleh karena itu, kunci informan penelitian ini, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Daftar Informasi Kunci

No.	Nama	Jabatan
1	Ibu Danik Sumartini	Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan
2	Ibu Nur Hidayati	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
3	Ibu Ning Nur Aida Arofah	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana
4	Bapak Imam Suwandi	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
5	Ibu Herlin Kusmaida	Tim Pendamping Keluarga
6	Ibu Anggi Taufa Maningsih	Masyarakat
7	Ibu Riskiyah	Masyarakat

3.5 Keabsahan Data

Menurut Gunawan (2013) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dan digunakan sebagai proses memantapkan validitas dan konsistensi (reabilitas) data serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Menurut Wijaya, 2019 triangulasi terdiri dari tiga macam, antara lain:

1. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai macam sumber, memperoleh data seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan oleh umum, dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik adalah upaya mengecek keabsahan data dengan membandingkan informasi melalui cara yang berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi namun dengan informan yang sama.
3. Triangulasi waktu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda.

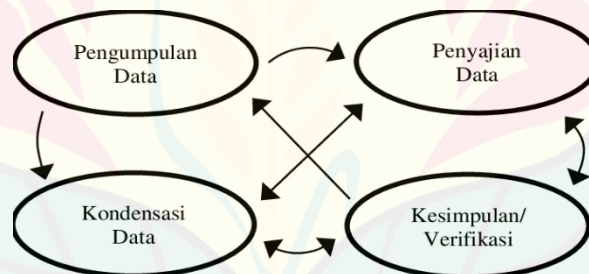
Contohnya ketika peneliti melakukan wawancara di pagi hari, dapat

dilakukan berulang di siang hari dan mengecek di pagi hari atau sebaliknya.

Mengacu pada penjelasan diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dicapai melalui perbandingan data hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan agar mendapatkan data yang akurat.

3.6 Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (2007, dikutip dalam Gunawan, 2013) analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dalam Sugiono, 2017) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai sehingga tidak lagi memperoleh informasi baru. Aktivitas analisis data yang akan dilakukan, antara lain:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

3.6.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses ini merupakan tahap awal dalam mengumpulkan data, data ini dapat diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, pengumpulan data ini dapat dilakukan sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan sehingga data yang dikumpulkan banyak.

3.6.2 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam bentuk catatan lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan empiris lainnya. Tujuan kondensasi data ini untuk menyortir, memfokuskan dan memadatkan informasi sesuai dengan penelitian sehingga mudah dianalisis.

3.6.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah di kondensasi dapat ditampilkan dalam bentuk penyajian data seperti uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori dan lainnya. Penyajian data ini digunakan untuk menyusun informasi secara ringkas sehingga dapat meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan analisis sajian.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

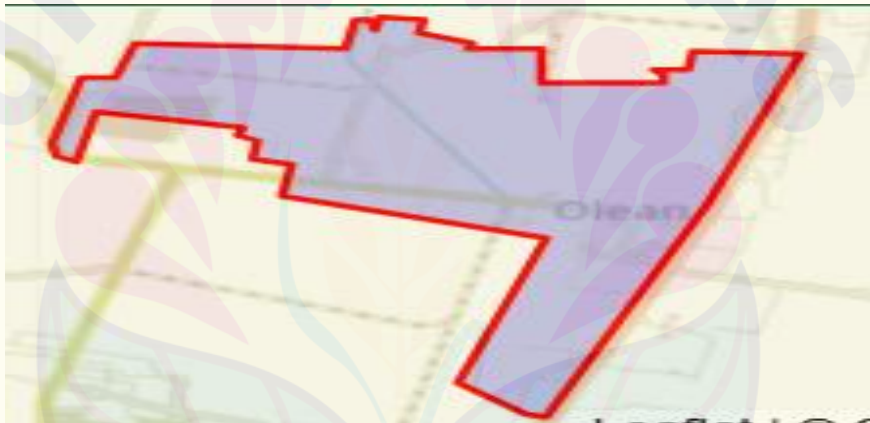
Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari data yang telah disajikan sebelumnya namun masih bersifat sementara. Dalam proses ini peneliti akan mencari hubungan sebab-akibat, mencari pola, asumsi dan jika data yang dikumpulkan cukup kuat, maka dapat ditarik kesimpulan akhir yang cukup kuat dan dapat dipertanggung jawabkn.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Secara administrasi Desa Olean memiliki 7 wilayah yakni Olean Selatan, Olean Tengah, Olean Krajan, Olean Nikas, Kandang Selatan, Kandang Barat, Kandang Utara. Desa Olean memiliki wilayah sekitar 256 Ha, yang dimana 80% nya merupakan wilayah yang terbentang persawahan, Desa Olean berbatasan dengan Desa Tenggir sebelah timur, Desa Duwet sebelah barat, Desa Tribungan sebelah utara, dan Desa Talkandang sebelah selatan.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Olean

Sumber data: website Sistem Teknologi Olean Online
<https://olean-situbondo.id/pemerintah> (diolah peneliti)

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan pada jumlah keluarga di Desa Olean yang tidak masuk ke dalam kategori keluarga resiko stunting sebanyak 1.596 keluarga, sedangkan jumlah keluarga sasaran sebanyak 769 keluarga yang telah masuk ke dalam kategori stunting. Dengan data tersebut, total jumlah keluarga menunjukkan bahwa jumlah keluarga sasaran di Desa Olean terbilang cukup banyak sehingga menjadi target intervensi Program Bangga Kencana.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting Berdasarkan Wilayah

Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Resiko Stunting
Olean Selatan	277	129
Olean Tengah	163	74
Olean Krajan	248	98
Olean Nikas	235	123
Kandang Selatan	260	131
Kandang Barat	137	62
Kandang Utara	276	152
Jumlah	1.596	769

Sumber data: Rekapitulasi Keluarga Berisiko (diolah peneliti).

4.2 Deskripsi Program Bangga Kencana

Program Bangga Kencana merupakan program nasional yang diresmikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau dikenal sebagai BKKBN yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas dan berdaya saing. Secara hukum, program ini didasarkan pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Fokus utama dari program ini untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, menjamin pemenuhan asupan gizi, serta memperbaiki pola asuh melalui intervensi yang dilakukan pemerintah. Salah satu tantangan pembangunan manusia di Indonesia adalah keluarga beresiko stunting karena keluarga resiko stunting memiliki resiko tinggi melahirkan anak stunting, maka untuk mencegah hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam program Bangga Kencana saat ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan misi asta cita Kabinet Merah Putih, khususnya pada pilar pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender dan pembangunan dari desa. BKKBN juga menerapkan berbagai program strategi atau disebut dengan *Quick Wins*, *Quick Wins* merupakan program unggulan dari BKKBN dirancang untuk memberikan hasil yang nyata dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas. Program *Quick Wins*, antara lain;

1. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi keluarga resiko stunting melalui optimalisasi pangan

local dan edukasi pengolahan makanan sehat bagi balita serta ibu hamil;

2. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang bertujuan mewujudkan generasi yang sehat dan tidak stunting melalui pemberian dukungan nutrisi, perbaikan sanitasi atau rumah layak huni serta edukasi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
3. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang bertujuan menciptakan generasi yang berkualitas dengan karakter dan berdaya saing serta meminimalkan dampak *Fatherless* atau kehilangan kehadiran ayah;
4. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat penitipan anak supaya menjadi lingkungan yang aman dan sehat, memantau perkembangan anak secara optimal serta mendukung produktivitas orang tua yang bekerja;
5. Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA) yang bertujuan mewujudkan lansia yang Tangguh, sehat, mandiri, aktif dan bermartabat serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perawatan jangka Panjang bagi lansia.

Dalam pelaksanaan program diperlukan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dengan melakukan edukasi gizi, kesehatan reproduksi serta pemantauan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan melalui verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, program Bangga Kencana menjadi instrument strategi dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting dengan cara perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan dasar.

4.3 Penyajian Data Hasil Penelitian

Desa Olean merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan situbondo yang memiliki kasus keluarga resiko stunting, sehingga dengan adanya program Bangga Kencana ini diharapkan dapat menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa informasi

yang diperoleh terkait Implementasi program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dengan menggunakan model Implementasi dari George Edward (1980) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi yang mencakup sebagaimana penyampaian informasi Program Bangga Kencana yang dilakukan kepada seluruh jajaran pelaksana dan kepada kelompok sasaran keluarga resiko stunting serta seberapa jelas dan konsisten informasi yang diterima, DP3AP2KB merupakan instansi yang bertanggung jawab memastikan seluruh jajaran dibawahnya memahami arah dan tujuan program, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“Disini di dinas dp3ap2kb khusus bidang dalduk, ada juga 2 bidang yang menyelenggarakan tentang keluarga berencana yaitu bidang dalduk dan bidang kbks jadi untuk pemberian penyuluhan kepada masyarakat kami tidak bekerja sendiri, jadi dibawah itu ada kader TPK dan PKB yang ikut memberikan penyuluhan, nah disitu secara spesifik ada beberapa fungsi yaitu meningkatkan fungsi dan promosi keluarga berencana juga mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, disini yang disebut dengan keluarga kecil berkualitas itu termasuk derajat kesehatan masyarakatnya Bagaimana, kesejahteraan keluarganya Bagaimana terus Kemudian peningkatan kualitas lingkungan dan juga partisipasi masyarakat itu seperti apa. Itu juga kami tidak bekerja sendiri disitu ada TPK yang sudah menyebar di 17 kecamatan dan termasuk juga ke desa desa dan penyampain ini juga melalui beberapa saluran salah satunya instagram” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa DP3AP2KB ini tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kerja sama dengan Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga. Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Nur selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“jadi kita punya kaki tangan di dp3ap2kb di setiap kecamatan itu ada balai penyuluh kb dari balai penyuluh kb itu ada yang Namanya penyuluh kb. Nah, penyuluh kb itu ada di 17 kecamatan dan ada 1 koordinatornya terus lainnya pelaksananya, sebagai contoh di balai

penyuluhan daerah panji ada 5 penyuluh Kemudian desanya ada 8 nanti itu dibagi jadi masing masing memiliki desa binaan. Disana mereka memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pertemuannya sering dilakukan harusnya masyarakat paham” (Wawancara, 01 Desember 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi program telah dilaksanakan dari tingkat kabupaten hingga desa, penyampaian informasi ini juga dibantu oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan Tim Pendamping Keluarga, dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya 1 kali namun dilakukan dengan bertahap dan konsisten. Selain itu terdapat kejelasan dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan yang diutarakan oleh Bapak Imam selaku penyuluh keluarga berencana.

“disini penyuluh KB menyampaikan informasi terkait program secara bertahap kepada PPKBD dan sub-PPKBD yang ada di setiap RW. Kemudian informasi yang di dapat, kami teruskan langsung di pertemuan balai penyuluh KB, terus mereka yang meneruskan ke masyarakat di wilayahnya masing-masing, jadi menurut saya mereka cukup paham karena kita tidak melakukannya hanya sekali selain itu kita telah melibatkan TPK sehingga pesan lebih mudah diterima hingga tingkat desa” (Wawancara, 16 Oktober 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi yang di dapat dari dinas, penyuluh keluarga berencana akan meneruskan informasi yang di dapat kepada PPKBD atau disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Hal ini, senada dengan wawancara yang diutarakan oleh Bapak Imam selaku penyuluh kb, dan diperkuat oleh Ibu Herlin selaku tim pendamping keluarga.

“informasi yang saya dapatkan itu lewat pertemuan rutin 1 bulan 1 kali yang diadakan oleh penyuluh keluarga berencana dan dari dinas juga ada disampaikan lewat sosialisasi. Kalau saya ke masyarakat menyampaikan informasinya ya melalui penyuluhan, pertemuan PKK sama pertemuan kader posyandu dan juga kadang saya sampaikan disaat pendampingan langsung dari rumah ke rumah keluarga sasaran” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa informasi yang di dapat telah tersampaikan dengan sangat baik kepada seluruh jajaran pelaksana maupun masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan yang

dilakukan secara bertahap dan konsisten, dari DP3AP2KB sebagai pelaksana tingkat kabupaten, dan dibantu dengan penyuluh keluarga berencana di 17 kecamatan kemudian informasi tersebut diteruskan kepada TPK tingkat desa melalui pertemuan bulanan PPKBD lalu disampaikan ke masyarakat melalui penyuluhan, pertemuan PKK dan posyandu maupun di instagram serta disaat melakukan pendampingan langsung. Sebagai tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Anggi salah satu kelompok sasaran keluarga resiko stunting.

“jelas, untuk terkait keluarga resiko stunting tau biasanya dapat undangan kalau mau ada penyuluhan atau pas posyandu, kadang kalau ke rumah ya saya bertanya ke petugas, anak saya yang kedua termasuk keluarga resiko stunting karena tinggi badannya yang kurang kalau berat badannya normal” (Wawancara, 29 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga sasaran upaya dari para pelaksana program dalam memberikan informasi telah dilakukan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait program Bangga Kencana untuk keluarga resiko stunting melalui sosialisasi, penyuluhan dan posyandu serta pendampingan ini tidak hanya 1 kali saja jadi benar benar diawasi dari saat ibu hamil hingga melahirkan serta sampai anak usia 2 tahun.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan dimensi yang mencakup pada sumber daya manusia karena ini berkaitan dengan kecapakan pelaksana kebijakan publik namun tidak hanya itu saja ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti alokasi anggaran, dan fasilitas serta layanan bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran. Jika salah satu sumber daya ini tidak memadai maka implementasi kebijakan bisa tidak berjalan dengan efektif. Terkait dengan sumber daya, hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut.

“sebetulnya kalo untuk penyuluh kb sendiri itu ada yang kurang, yang pertama banyak yang mau pensiun, yang selanjutnya ada yang belum diangkat dan lain sebagainya, jadi untuk melaksanakan tupoksi yang

lebih besar ini masih kurang lengkap lah terus kemudian di dinas juga seperti itu sekarang kan tidak boleh merekrut tenaga magang karena keterbatasan anggaran jadi SDM yang ada di kelola dengan semaksimal mungkin. Kalo kurang sih ya kurang, untungnya setiap tahun itu ada beberapa dari sekolah untuk magang ya di kedinasan itu bisa membantu paling tidak untuk pelaksana pengetikan gitu masih ada yang membantu, cuma ini kan tidak bisa diandalkan kan yang seharusnya ada kan pegawainya, seperti itu jadi kurang sekali. Jadi yang ada harus betul betul di maksimalkan” (Wawancara, 01 Desember 2025)

Selain itu pernyataan diatas juga diperkuat dengan yang disampaikan oleh Bapak Imam selaku Penyuluh Keluarga Berencana, sebagai berikut.

“untuk jumlah staff kalau dibilang cukup ya tidak juga karena tiap bulan petugasnya ada yang pensiun jadi sekarang PNSnya aja tinggal 2, jadi ideal nya petugas biasanya 1 orang 1 desa dan disini ada 6 desa jadi 1 petugas lapangan megang 2 desa” (Wawancara, 16 Oktober 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa jumlah penyuluh KB dan jumlah pegawai di dinas masih tidak mencukupi. Kekurangan pegawai ini di akibatkan oleh faktor seperti beberapa pegawai ASN hampir memasuki usia pensiun tanpa adanya pengganti resmi. Selain itu, jumlah petugas lapangan yang bertanggung jawab untuk memantau keluarga resiko stunting masih kurang petugasnya untuk mencapai kinerja yang ideal. Meskipun kondisi penyuluh KB di Kecamatan Situbondo masih belum tercukupi namun di tingkat desa jumlah TPK sudah terpenuhi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Herlin selaku Tim Pendamping Keluarga di Desa Olean, sebagai berikut.

“TPK disini ada 12 orang, insyaallah cukup kalau TPK menyampaikan informasi soalnya kan setiap wilayah ada TPK, setiap 1 dusun itu ada TPK nya masing masing. Disini tpk nya ada 7 tapi TPK nya dirangkap, tim 1 Krajan Barat sama Krajan Timur kalau tim 2 Cuma 1 di Olean Tengah, tim tiga saya Di Kandang Selatan sama Kandang Utara kalo tim 4 Olean Selatan sama Kandang Barat” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa jumlah TPK pada Desa Olean telah tercukupi untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran secara langsung meskipun dengan kondisi jumlah pegawai dinas dan

penyuluh KB di Kecamatan Situbondo yang kurang. Akan tetapi dengan kondisi tersebut, kegiatan pendampingan yang dilakukan di Desa Olean berjalan efektif. Keberadaan anggaran merupakan hal penting untuk menjalankan program karena jika anggaran tidak memadai maka program tidak akan berjalan dengan maksimal, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“kalo anggaran ada APBN, ada DAK, ada yang APBD. Kalo DAUnya kita ya sedikit, ya tapi memang petunjuk dari bapak bupati kan tidak harus berpaku pada anggaran tapi harus memikirkan kebutuhan masyarakat. Untuk APBDnya masih kurang tapi kita itu terbantu dengan program DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Selain itu, anggaran untuk operasional keluarga resiko stunting juga termasuk dalam anggaran gaji untuk para tim pendamping keluarga tiap tingkat desa hingga RW, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut.

“Kalau alokasi anggaran saya kira antara Kabupaten situbondo masih cukup sekali untuk kader IMP dan Sub IMP itu insentifnya 100rb tiap bulan tapi setiap tahun itu juga ada honor insentif sebesar 500rb tiap tahun diberikan di tahun 2025. Ini juga kan untuk pengabdian masyarakat ya jadi mereka itu walaupun hanya di insentif dengan minim 100rb semua beban insyaallah jalan” (Wawancara, 01 Desember 2025)

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Herlin selaku tim pendamping keluarga.

“kalau anggaran, pada saat pendampingan bumil itu ada dari desa 1 bumil 50rb kalau saya mau pendampingan kemana gitu kayak ke IC terpadu, mau periksa ke puskesmas dapat 1 orang 50rb dari desa dan ada insentifnya per bulan 100rb serta ada honor insentif 500rb tiap tahun” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa anggaran Program Bangga Kencana ini bersumber pada APBN, APBD, APBDes serta DAK. Meskipun anggaran masih terbatas, semua pelaksana telah berusaha memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mengisi kekurangan tersebut karena Program Bangga Kencana tidak hanya berpaku pada anggaran namun harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada program tersebut serta mencapai tujuan program. Demi kelancaran program fasilitas

yang memadai juga dapat mempengaruhi jalannya program karena disaat melakukan pendampingan dibutuhkan alat pengukur pertumbuhan baduta serta timbangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“Terpenuhi karena dari TPK itu kan satu kader kb, Kedua dari TPK Kabupaten, ketiga bidan desa jadi ketiga ini ketika melakukan pendampingan, baduta ini harus di timbang, diukur, berat badan dan sebagainya jadi mereka masih ada menggunakan timbangan” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Di tingkat kecamatan, untuk petugas penyuluh kb sendiri telah memiliki balai penyuluh kb, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku penyuluh kb.

“iya memadai, sekarang kita sudah punya gedungnya untuk penyuluhan, kalau dulu kan kita meminjam gedung ke kecamatan kalau mau mengadakan penyuluhan” (Wawancara, 16 Oktober 2025)

Sedangkan di tingkat desa tidak memiliki fasilitas yang khusus, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Herlin selaku tim pendamping keluarga.

“tidak ada, untuk pengukuran adanya cuma milik posyandu itu jadi jika ada acara nanti kita pinjam untuk mengukur baduta itu” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki tidak sama seperti di tingkat kecamatan yang sudah tersedia gedung balai penyuluh kb serta fasilitas pengukuran dan penimbangan untuk baduta, sedangkan di tingkat desa jika saat TPK melakukan pendampingan harus meminjam alat pengukuran dan penimbangan baduta ke posyandu terdekat namun hal ini tidak menjadi hambatan karena TPK sendiri terdiri dari kader kb, tpk kabupaten dan bidan sehingga fasilitas tersebut berada di posyandu. Sebagai tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Riskiyah salah satu kelompok sasaran keluarga resiko stunting.

“dapat bantuannya daging ayam, telur, sama yang sehari hari nasi itu PMT, sama susu kemaren yang di balai” (29 Oktober 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa ini merupakan wujud nyata intervensi program dalam pemenuhan gizi keluarga sasaran yang diterima langsung oleh masyarakat, bantuan yang diberikan berupa susu, daging ayam, dan makanan gizi lainnya.

4.3.3 Disposisi

Disposisi merupakan dimensi yang mencakup pada komitmen, motivasi dan sikap para pelaksana pada saat melaksanakan tugasnya. Implementasi kebijakan akan berhasil jika disposisi para pelaksana positif namun sebaliknya jika disposisi para pelaksana negatif maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan walaupun komunikasi dan sumber daya yang tersedia mencukupi. Penilaian kinerja seluruh jajaran pelaksana program akan menjadi cerminan dari seberapa seriusnya para pelaksana dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“Menurut ibu tanpa mereka dibantu dengan kader jadi kita tidak bisa apa apa, jadi alhamdulillah ada kader yang selalu membantu dengan cukup baik. Kalau tantangan itu dimana mana pasti ada, jadi kita disini sebagai pelaksana di DP3AP2KB dengan juga penyuluh kb di 17 kecamatan kami selalu mengingatkan apabila ada kegiatan ini yang belum dilakukan termasuk yang belum dilaporkan itu kami selalu mengingatkan, jadi kegiatan kegiatan ini memang tantangannya banyak karena mungkin tadi ya, dengan honor yang diterima hanya 100rb, mungkin mereka bermalas malasan atau bagaimana tapi mereka tetap bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan ini dengan dasar kebaktian pada masyarakat” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa para pelaksana telah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“saya kira ya dimaksimalkan masing masing cuma kalau ada kegiatan ya kurang, intinya SDMnya kurang, mungkin perlu penataan dari pimpinan, mungkin ada program yang tidak padat bisa dialihkan di rotasi, maksudnya manajemen SDM saja, dimaksimalkan yang ada

karena tidak boleh perekrutan baru kan saat ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak boleh merekrut baru kecuali kalau ada CPNS dan P3K, walaupun begitu yang pasti tetap berkomitmen ya saat melaksanakan tugas, karena itu kan rencana kerja OPD kita yang berfokus pada kependudukan seperti pada pengendalian penduduk” (Wawancara, 01 Desember 2025)

Hal ini juga senada dengan yang diutarakan oleh Ibu Ning selaku Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana.

“menurut saya semua yang ada disini bekerja dengan sangat baik walaupun keterbatasan pegawai, semua dimaksimalkan, dan koordinasi antar petugas ya berjalan dengan baik, kalau tantangan pasti ada, apalagi menjaga semangat para kader dan petugas lapangan, belum lagi beban kerjanya karena kekurangan personal yang 1 petugas memegang 2 desa, untuk petugas lapangan di desa itu kita memberikan insentif 120rb per bulan ditambah dengan pulsa 50rb, insyaallah semua bisa dilaksanakan dengan baik” (Wawancara, 16 Oktober 2025)

Di desa, peran TPK sangatlah penting, mereka merupakan ujung tombak dalam menjalankan program Bangga Kencana karena tugas mereka adalah melakukan pencegahan dini faktor resiko stunting dan memastikan setiap keluarga sasaran mendapatkan pendampingan yang tepat. Jika disposisi di tingkat desa negatif dapat dipastikan membuat penanganan keluarga resiko stunting ini tidak berjalan dengan baik namun sebaliknya jika disposisinya positif maka penurunan angka resiko stunting akan terbukti berjalan dengan efektif, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Herlin selaku tim pendamping keluarga.

“iya alhamdulillah cukup baik, tim kami di Desa Olean semua saling membantu dan koordinasinya lancar, untuk tantangannya pasti ada seperti keluarga yang sulit ditemui atau menolak karena merasa anaknya itu sehat tidak stunting gitu tapi kita terus berusaha mendekati yang penting niat kita baik untuk membantu” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kinerja seluruh jajaran para pelaksana Program Bangga Kencana telah dilakukan dengan baik walaupun pada tingkat dinas dan balai penyuluh kb sumber daya manusianya kurang memadai namun seluruh jajaran pelaksana telah melaksanakan tugas dengan sangat baik hingga tingkat desa, sebagai tambahan informasi, peneliti juga

melakukan wawancara dengan Ibu Anggi salah satu kelompok sasaran keluarga resiko stunting.

“petugasnya yang pas ke rumah mendata ya ramah waktu saya hamil, terus saya juga sempat bertanya ya dijawab juga sama petugasnya. Pas dikasih tau harus gimana iya saya setuju nurut, karena saya kan punya pengalaman anak ke 2 tingginya kurang jadi saya nurut kan biar tambah sehat anaknya” (Wawancara, 29 Oktober 2025)

Selain itu pernyataan diatas juga diperkuat dengan yang disampaikan oleh Ibu Riskiyah selaku salah satu keluarga kelompok sasaran.

“pas datang ke rumah petugasnya ya ramah, kalo disuruh mengubah cara mengasuh ya saya mau karena anak saya yang kedua juga tinggi badannya kurang” (Wawancara, 29 Oktober 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa para pelaksana dari tingkat dinas hingga desa memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan Program Bangga Kencana untuk kepentingan masyarakat, sikap professional yang dilakukan oleh seluruh jajaran pelaksana berhasil membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat ingin ikut berpartisipasi dan bersedia mengubah perilaku sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan program.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi yang mencakup pada Prosedur Operasional Standar (SOP) dan mekanisme pembagian tugas antar pelaksana, jika struktur birokrasi tidak jelas maka implementasi program tidak akan berjalan dengan baik, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“ada, yang mengatur mengSOPkan ini untuk pelaksana, kalau kita pegawai daerah tapi penyuluh kb itu pegawai pusat jadi SOP-SOP dari pusat semua” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Selain itu, pernyataan diatas juga diperkuat dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana bahwa prosedur ini dibagikan secara bertahap kepada pelaksana tingkat desa.

“SOP nya ada itu selalu diberikan dari penyuluh kb lalu ke tim pendamping keluarga” (Wawancara, 01 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui Prosedur Operasional Standar (SOP) Bangga Kencana sudah tersedia dari tingkat pusat hingga tingkat desa untuk menjamin seluruh jajaran pelaksana jalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola program menjadi terarah dan konsisten di seluruh wilayah. Adapun pembagian tugas antar pelaksana dari dinas hingga desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Danik selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

“sebenarnya DP3AP2KB ini merupakan hasil *merge* 2 dinas, dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak sama pengendalian penduduk keluarga berencana jadi satu, ada SK baru kayaknya SK Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, disitu ada tupoksinya masing masing bidang” (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Selain itu, struktur birokrasi di tingkat kecamatan penyuluh kb digambarkan sebagai komando yang membawahi PPKBD dan sub PPKBD, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku penyuluh kb.

“kalau dari kita penyuluh keluarga berencana itu bawahannya petugas pembantu keluarga berencana desa/PPKBD terus ada bawahannya sub PPKBD, sub itu letaknya di setiap wilayah setiap RW jadi kita informasinya dari sana dan kita undang dia ke balai penyuluh keluarga berencana lalu kita berikan kepada dinas” (Wawancara, 16 Oktober 2025)

Di tingkat desa, Ibu Herlin selaku tim pendamping keluarga menggambarkan pembagian antar anggota cukup terorganisasi, sebagai berikut.

“kalau di tim saya alhamdulillah tepat cukup baik, saya yang ngisi elsimil terus yang mendata 2 orang itu dah jadi kalo saya minta data bayi ini, minta data bumil ini, minta foto rumah, foto wc dan lainnya langsung dah 2 orang itu ngirim ke saya, dan kalo rumahnya dekat ya saya yang kesana sendiri minta langsung” (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam pembagian tugas dari dinas hingga desa cukup jelas. Di tingkat kabupaten

DP3AP2KB sebagai instansi yang bertanggung jawab pada jalannya program terkait keluarga resiko stunting, di tingkat kecamatan penyuluh kb sebagai koordinator lapangan yang membawahi PPKBD hingga tingkat RW lalu tim pendamping keluarga sebagai pelaksana langsung tingkat desa dalam melaksanakan pendataan, edukasi hingga pendampingan langsung kepada keluarga sasaran.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan pembahasan dengan menganalisis data pada hasil penyajian data yang telah peneliti sajikan, berdasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi selama peneliti melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi George Edward III yang mencakup 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.4.1 Komunikasi

Implementasi Program Bangga Kencana terkait Keluarga Resiko Stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dapat ditinjau melalui teori implementasi kebijakan model George Edward III, dimensi ini untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu telah disampaikan secara tepat, akurat dan konsisten ke seluruh jajaran pelaksana hingga sampai ke keluarga sasaran. Pada proses penyampaian informasi mengenai implementasi program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting di Desa Olean telah berjalan cukup efektif. Dalam penyampaian informasi ini berlansung dari DP3AP2KB tingkat kabupaten, penyuluh keluarga berencana tingkat kecamatan hingga TPK tingkat desa serta keluarga sasaran resiko stunting, penyampaian ini dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pertemuan PPKBD, posyandu, PKK hingga kunjungan rumah keluarga resiko stunting. Pada pendekatan yang dilakukan secara berulang, informasi mengenai program tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat, dan juga dikonfirmasi langsung oleh salah satu keluarga sasaran resiko stunting Ibu Anggi. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ini selaras dengan prinsip

George Edward III terkait transmisi informasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, kejelasan informasi dengan penyampaian yang berulang sehingga dapat dipahami, dan konsistensi informasi ke seluruh jajaran pelaksana hingga keluarga sasaran resiko stunting.

4.4.2 Sumber Daya

Pada implementasi Program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dapat ditinjau melalui teori implementasi kebijakan model George Edward III, dimensi ini merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, ketersediaan fasilitas serta bantuan langsung yang diterima keluarga sasaran yang menjadi faktor yang memengaruhi implementasi. Pada dimensi ini ditemukan kondisi yang bervariasi di setiap jajaran pelaksana seperti di tingkat dinas dan di balai penyuluh keluarga berencana yang kekurangan pegawai yang disebabkan adanya pegawai yang pensiun tanpa pengganti resmi, karena keterbatasan ini sangat berdampak pada beban kerja pegawai yang ada terutama penyuluh keluarga berencana karena idealnya satu petugas memegang satu desa binaan. Sementara itu, pada tingkat desa dinilai telah mencukupi dan mampu menjangkau semua keluarga sasaran. Adapun anggaran program yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, serta APBDes meskipun anggaran masih terbatas, semua pelaksana telah memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia karena program tidak hanya berpaku pada anggaran namun harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada program tersebut serta mencapai tujuan program. Pada aspek fasilitas yang digunakan untuk petugas di tingkat kecamatan dan desa, kondisi sarana dan prasarana fasilitas telah memadai untuk kegiatan koordinasi, meskipun di tingkat desa disaat melakukan pendampingan di lapang untuk ketersediaan alat pengukuran dan penimbangan baduta harus meminjam ke posyandu. Terakhir, pada aspek bantuan langsung yang diterima oleh salah satu keluarga sasaran berupa susu, telur, daging ayam dan makanan sehat lainnya. Dengan

ini, dimensi sumber daya pada implementasi program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting menurut model implementasi George Edward III ketersediaan fasilitas dapat dinilai cukup memadai walaupun pada tingkat TPK desa harus meminjam ke posyandu, kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran masih kurang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada program ini tidak mempengaruhi semangat pengabdian kepada masyarakat terbilang masih cukup mampu menjadi penopang keberlangsungan program.

4.4.3 Disposisi

Pada implementasi Program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dapat ditinjau melalui teori implementasi kebijakan model George Edward III, dimensi ini mencakup pada ketersediaan implementor dalam melaksanakan kebijakan program. Komitmen sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini merupakan hal penting. Pada dimensi disposisi seluruh jajaran pelaksana program telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap yang positif dan nilai pengabdian para pelaksana kepada masyarakat menjadikan motivasi bagi tim pendampingan keluarga terutama di tengah keterbatasan insentif yaitu berkisar 100rb hingga 120rb per bulan ditambah pulsa 50rb, dengan keadaan seperti itu tim pendamping keluarga masih tetap meluangkan waktu dan tenaga. Kegigihan TPK dalam mendekati keluarga resiko stunting yang sulit ditemui mencerminkan sikap petugas yang tidak mudah menyerah serta sikap ramah pada saat di lapangan berhasil membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat karena sikap responsif petugas yang baik. Hal ini telah dirasakan langsung oleh salah satu keluarga sasaran resiko stunting yakni Ibu Anggi dan juga bersedia menerapkan perubahan perilaku yang disarankan. Dengan ini, dimensi disposisi telah sejalan dengan pandangan George Edwards III bahwa sikap dan komitmen pelaksana sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan

4.4.4 Struktur Birokrasi

Pada implementasi Program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dapat ditinjau melalui teori implementasi kebijakan model George Edward III, dimensi ini mencakup prosedur rutin dan terstandarisasi yang memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. SOP yang digunakan sebagai pedoman Program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting dinilai cukup jelas dan rinci sehingga para pelaksana tidak bingung pada saat melaksanakan tugasnya, SOP yang di dapat bersumber dari BKKBN kemudian dibagikan dari penyuluh keluarga berencana hingga tingkat TPK desa. Struktur birokrasi Program Bangga Kencana dari tingkat pusat, sebagai berikut.

1. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN di pimpin oleh Wakil Presiden dan Kepala BKKBN yang bertugas menyusun regulasi, strategi serta mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh.
2. Tingkat provinsi perwakilan BKKBN provinsi, bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi jalannya program agar sejalan dengan visi nasional dengan menyesuaikan daerah masing masing.
3. Tingkat kabupaten atau kota, struktur pada tingkat kabupaten berada dibawah pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Situbondo. Pelaksana utama Program Bangga Kencana di wilayah administrasi adalah DP3AP2KB, khususnya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bidang ini bertanggung jawab menyusun dan menjalankan program operasional Bangga Kencana melalui dana APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) serta struktural ini secara resmi berdasar pada Peraturan Bupati (Perbup) Situbondo Nomor 56 Tahun 2021.

4. Tingkat Kecamatan, berada di Balai Penyuluh Keluarga Berencana berfungsi sebagai pos komando operasional, dikoordinasikan oleh koordinator PKB yang membawahi sejumlah penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana bertugas untuk menggerakkan dan mengoordinasikan kader serta masyarakat tingkat desa dan kelurahan.
5. Tingkat desa atau kelurahan, IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)/Sub-IMP merupakan kelompok wadah partisipasi masyarakat, PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) merupakan tokoh atau kader yang ditugaskan untuk mengelola, mencatat, menggerakkan program keluarga berencana di desa, Sub-PPKBD di tingkat dusun atau RW, kelompok kegiatan (Poktan) seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) serta posyandu merupakan titik pelayanan kesehatan dan konseling dasar keluarga terpadu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan pencegahan stunting.

Dengan ini, dimensi struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan implementasi model George Edward III bahwa pelaksana kebijakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

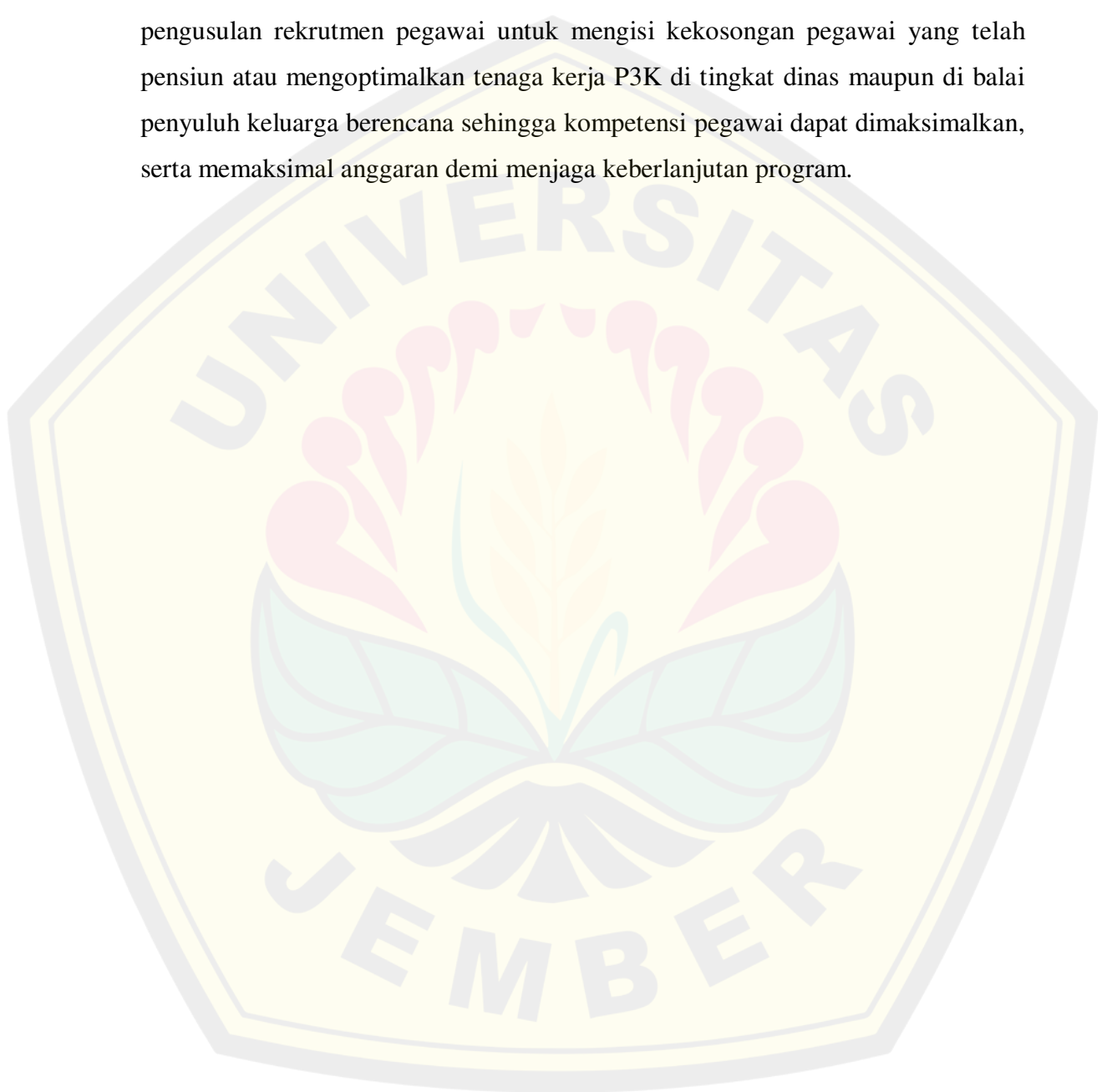
BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bangga Kencana dalam menurunkan angka keluarga resiko stunting merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan tangguh. Upaya ini dilakukan melalui pengaturan kelahiran, jarak kehamilan, dan penentuan usia ideal melahirkan yang diintegrasikan ke dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BKKBN berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada teori implementasi kebijakan model George Edward III secara keseluruhan program ini telah berjalan cukup efektif meskipun masih ada beberapa keterbatasan. Bentuk penyampaian informasi terkait program telah berlangsung cukup efektif melalui berbagai saluran, mulai dari tingkat kabupaten hingga keluarga sasaran resiko stunting di Desa Olean dengan pendekatan yang konsisten dan berulang. Kondisi sumber daya pada program ini menunjukkan ketersediaan fasilitas cukup memadai tetapi untuk sumber daya manusia dan anggaran masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya aparatur PNS yang telah memasuki masa pensiun pada petugas pelaksana tingkat kecamatan dan penganggaran untuk jalannya program kurang belum optimal. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat pengabdian di seluruh jajaran pelaksana dalam menyukseskan program. Seluruh pelaksana telah menunjukkan komitmen yang kuat dan sikap yang positif sehingga bisa membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi keluarga sasaran resiko stunting di Desa Olean dalam menerapkan perubahan perilaku terutama terkait pola asuh. Berjalannya program ini telah berpedoman pada SOP yang bersumber dari BKKBN serta dalam pembagian tugas para pelaksana telah memiliki tugasnya masing masing sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021 sehingga seluruh pelaksana dapat menjalankan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Bangga Kencana terkait keluarga resiko stunting di Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Dalam aspek sumber daya, pemerintah perlu memberlakukan pengusulan rekrutmen pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang telah pensiun atau mengoptimalkan tenaga kerja P3K di tingkat dinas maupun di balai penyuluh keluarga berencana sehingga kompetensi pegawai dapat dimaksimalkan, serta memaksimal anggaran demi menjaga keberlanjutan program.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Saebani, B. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Alexandra, Y., & Yusran, R. (2024). Evaluasi Implementasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Penurunan Stunting Di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 283-292.
- Devina, R., & Ananda, F. (2025). Implementasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 1–10. DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2954>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muharram, F., Cholifah, S., & Utami, P. J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 274-287. DOI: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3790>
- Nugroho, R. (2024). *Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Politik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nuranti, A., Rahmawati, R., & Lyndon, N. A. (2025). Peran penyuluhan dan edukasi program Bangga Kencana oleh pemerintah daerah dalam pencegahan stunting pada anak di daerah pedesaan. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 11–18.
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Rachmawati, N. R. T., Hartono, S., & Radjikan. (2024). Implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(6), 151–164.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH

- Sokoy, F. J. (2023). *Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Proses Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Jayapura* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Utomo, Y. A., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana Keluarga Berencana Di Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 292-310. DOI: [10.14710/jppmr.v12i3.39831](https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39831)
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Telepon (0331) 335586
Jember 68121
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 7150/UN25.1.2/PG/2025
Lampiran : satu eksemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

16 September 2025

Yth. Kepala LP2M
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara memperkenalkan mahasiswa kami :

Nama : Elvira Githa Sena Putri
NIM : 190910201019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Situbondo dengan lama penelitian 3 bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Menurunkan Stunting di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.". Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


 Widyaiswara Bidang Akademik,
 Rudi Heliastuti, S.Sos., M.Si.
 NIDN 03221993122001



Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
 Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927
 Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 000.9.2/307/431.406/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Jember Nomor 08257/UN25.3.1/LT/2025 Tanggal 18 September 2025.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Elvira Githa Sena Putri
 Alamat/No. HP : Jl. Seroja Gg III, RT.004/RW.005, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo / 082228363912
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi/Organisasi : Universitas Jember
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Implementasi Program Bangga Kencana dalam Menurunkan Stunting di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo
 Tujuan : Penyusunan Tugas Akhir
 Bidang : Kebijakan Publik
 Penanggung Jawab : Hermanto Rohman S.Sos., MPA. dan Dr. Suji, S.Sos., M.Si.
 Anggota : -
 Waktu : 26 September 2025 sampai dengan 30 November 2025
 Status Penelitian : ☒ Baru ☐ Perpanjangan
 Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 26 September 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO



BUCHARI, S.E.T
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Situbondo

Elektronik yang diterbitkan BSR/E BSSN



Page 1/1

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Mawar No.25, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312,
 Telepon (0338) 4590990,
 Laman <https://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/> Pos-el dp3ap2kb@situbondokab.go.id

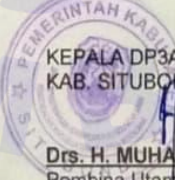
Situbondo, 30 September 2025

Nomor : 000.9.2/ 4313 /431.307/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi PKL

Menindaklanjuti surat dari Bakesbangpol, Nomor: 000.9.2/307/431.406/2025, tanggal 26 September 2025, perihal: Surat Keterangan, maka kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: ELVIRA GITHA SENA PUTRI
Alamat	: Jl. Seroja Gg. III, RT. 004/RW. 005, Dawuhan Kec. Situbondo, Kab. Situbondo
Pekerjaan	: Mahasiswa
Instansi/Organisasi	: Universitas Jember
Kebangsaan	: Indonesia
Judul	: Implementasi Program Bangga Kencana dalam Menurunkan Stunting di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo
Tujuan	: Penyusunan Tugas Akhir
Bidang	: Kebijakan Publik
Penanggung jawab	: Hermanto Rohman, S.Sos., MPA. dan Dr. Suji, S.Sos., M.Si.
Anggota/Peserta	: -
Waktu	: 26 September 2025 s/d 30 November 2025
Lokasi Penelitian	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Selama melaksanakan Penelitian/PKL/KKN diharapkan kepada saudara pengambil data berkewajiban untuk menghormati dan menaati ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.


KEPALA DP3AP2KB
KAB. SITUBONDO
Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670101 198809 1 003

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan dan Foto Wawancara

